BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dilakukan pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan menggunakan metode Klasterisasi K-medoids. Klaster optimum diperoleh dengan menggunakan validitas klaster *Silhouette Index* yang terbentuk sebanyak dua klaster. Kabupaten/kota yang menjadi anggota klaster 1 adalah sebanyak 221 kabupaten/kota, sedangkan klaster 2 adalah sebanyak 293 kabupaten/kota.

Berdasarkan peta klaster kabupaten/kota yang terbentuk dapat dilihat secara umum bahwa di Sumatera kabupaten/kota yang termasuk klaster 1 umumnya terletak di bagian timur Sumatera, di Jawa umumnya termasuk klaster 2 kecuali 19 kabupaten/kota yaitu di Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Banjarnegara, Batang, Brebes, Pacitan, Trenggalek, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sumenep, Padeglang, Lebak, dan Serang. Di Nusa Tenggara kabupaten/kota secara umum termasuk klaster 1 kecuali Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, Belu, Lembata, Ngada, Nagekeo, dan Kota Kupang. Di Kalimantan kabupaten/kota yang termasuk klaster 1 umumnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya di Sulawesi

kabupaten/kota yang termasuk klaster 1 lebih banyak di Sulawesi Barat. Di Maluku kabupaten/kota umumnya termasuk klaster 1 kecuali Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Kota Ambon, Kota Tual, Kepulauan Sula dan Kota Ternate. Kemudian di Papua umumnya termasuk klaster 1 kecuali kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong, Kota Sorong, Nabire, Biak Numfor, Mimika, Waropen, Supiori, Yalimo, Deiyai, dan Kota Jayapura.

Karakteristik yang terbentuk dilihat dari rata-rata setiap indikator. Pada klaster 1 memiliki karakteristik variabel persentase penduduk miskin (X_1), persentase bekerja di sektor informal (X_5), persentase pengeluaran per kapita untuk makanan (X_6), persentase menerima beras miskin (X_9) lebih tinggi dan variebel persentase tamat pendidikan SLTA+ (X_2), persentase pendidikan SD/SLTP (X_3), persentase angka partisipasi sekolah (X_4), persentase menggunakan air layak (X_7), dan persentase menggunakan jamban sendiri (X_8) lebih rendah. Sehingga dengan membandingkan karakteristik variabel kedua klaster dapat disimpulkan bahwa karakteristik pada klaster 2 lebih baik dari pada klaster 1, artinya kabupaten/kota pada klaster 2 memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan pada klaster 1.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan proses pengklasteran dengan metode klaster lainnya serta bandingkan hasil yang diperoleh dari metode yang telah digunakan untuk mengetahui hasil pengklas-

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

teran terbaik. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian mengenai pengklasteran kabupaten/kota menurut indikator kemiskinan di Indonesia diharapkan perlu adanya kebijakan dan tindakan efektif dari pemerintah akan indikator yang menjadi faktor kemiskinan. Dengan menggunakan metode analisis klaster yang mengelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik kabupaten/kota, pemerintah dapat membuat kebijakan yang sama pada kabupaten/kota yang berada dalam klaster yang sama.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA